BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan provinsi di Indonesia yang terkenal dengan istilah pulau seribu pura. Bali dikenal istilah seribu pura berkaitan dengan dominasi penduduknya yang beragama Hindu. Bali memiliki beragam tradisi dan kebudayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut Agustana, dkk (2017) Pura adalah istilah untuk tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura di Indonesia terkonsentrasi di Bali sebagai pulau dengan mayoritas penduduk penganut agama Hindu. Setiap pura memiliki organisasi keagamaan yang mengatur pengelolaan keuangan dan operasional setiap diadakannya upacara atau pembangunan yang berkaitan dengan pura. Organisasi keagamaan yang mengatur administrasi dan operasional pura disebut dengan istilah *"Pengempon"* Pura yang memiliki arti pengelola pura. Organisasi *pengempon* pura merupakan salah satu organisasi nonlaba.

Organisasi nonlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi pada laba serta sumber daya organisasi diperoleh dari para anggota dan penyumbang lainnya tanpa mengharapkan imbalan. Organisasi nonlaba meliputi tempat ibadah, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas

pemerintah. *Pengempon* pura secara umum memiliki pengelolaan keuangan yang sederhana dengan pendanaan organisasi yang berasal dari *peturunan* anggota atau iuran, sumbangan masyarakat, donatur, atau bantuan sosial lainnya. Mengingat sumber pendanaan dominan dari masyarakat maka pihak *pengempon* perlu untuk mempertanggungjawabkan ke publik terkait pengelolaan keuangan dan juga perlunya penyajian yang akuntabel dan transparan dalam pelaporannya. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat menjadi kunci sukses bagi entitas untuk tetap eksis dan bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat. Pentingnya mewujudkan *good governance* dengan menerapkan aspek akuntabilitas di dalam setiap organisasi harus dicermati oleh setiap organisasi agar dipercaya oleh para *stakeholder*. Menurut Wati, dkk (2017) tidak hanya organisasi pemerintahan yang dituntut untuk menerapkan konsep akuntabilitas di dalam pelaporannya, namun organisasi non pemerintahan pun sudah mulai mendapat tuntutan untuk menyampaikan laporan keuangannya secara terbuka dan akuntabel.

Masyarakat sendiri mengenal empat jenis pura yaitu Pura *Kahyangan Jagat*, Pura *Kahyangan tiga*, Pura *Swagina*, dan Pura *Kawitan*. Menurut Suparman & Kresna (2017) perbedaan ke empat pura tersebut menurut agama hindu terletak pada fungsi pura, dan pengelolanya. Pura *Kahyangan jagat* merupakan pura yang menjadi stananya *Dewata Nawa Sanga* sehingga pura ini terbuka untuk umum. Pengelola pura ini biasanya pemerintah daerah Bali atau pemerintah daerah kabupaten tempat berdirinya pura tersebut. Salah satu contoh Pura *Kahyangan Jagat* adalah Pura Besakih yang dikelola oleh pemerintah daerah Bali. Pura *Dang Kahyangan jagat* adalah bagian dari pura *Kahyangan* dengan tujuan sebagai tempat pemujaan dan penghormatan terhadap guru-guru suci untuk menghormati jasa-jasa

seorang *pandita* seperti Pura Rambut Siwi yang berkaitan dengan perjalanan rohani Dang Hyang Nirartha yang meletakkan sehelai rambutnya sehingga bernama Rambut Siwi. Selanjutnya adalah Pura *Kahyangan tiga* yang ada di setiap desa *pakraman* dengan tiga tempat persembahyangan. Tiga pura tersebut masing-masing adalah Pura *Desa* yang menjadi *stana* Dewa Brahma, Pura *Dalem* yang menjadi *stana* Dewa Siwa, serta Pura *Puseh* yang merupakan *stana* Dewa Wisnu. Pura *Kahyangan tiga* biasanya dikelola oleh desa *pakraman* dan ditujukan untuk persembahyangan *krama* adat desa *pakraman* tersebut.

Pura *Swagina* merupakan pura untuk umat bermata pencaharian tertentu. Contohnya adalah Pura Pulaki dan Melanting yang ditujukan untuk persembahyangan umat bermatapencaharian sebagai pedagang. Pura Melanting dan Pulaki menurut (Baikhaki, 2019) dikelola oleh 42 desa adat yang ada di Kecamatan Seririt dan Gerokgak. Pura yang terakhir yaitu Pura *Kawitan*. Pura *Kawitan* dibangun berdasarkan asal-usul dalam satu garis keturunan atau *"wit"* sehingga dikenal dengan nama "*Kawitan*". Pengelola Pura *Kawitan* adalah khusus warga *kawitan* tersebut tidak untuk umum. Contohnya seperti Pura *Kawitan* Pasek Gelgel yang dikelola oleh warga Pasek saja. Selain ke empat pura tersebut, umat Hindu di Bali juga mengenal tempat pemujaan leluhur keluarga yang disebut *"Sanggah Jajaran".* menurut Detris, dkk (2019) Sanggah Jajaran merupakan tempat suci khusus untuk keluarga dengan *pengempon* khusus keluarga saja.

Pura Agung Asem Kembar merupakan salah satu contoh Pura *Dang Kahyangan Jagat* yang diresmikan tahun 2004 untuk semua umat Hindu. Menurut salah satu *pengempon* Jro Mangku Gede Sukerata menyatakan bahwa Pura ini termasuk *Dang Kahyangan* karena Pura Agung Asem Kembar dibangun untuk

pemujaan Dukuh Sakti. Hal itu karena tempat ini dulunya adalah tempat "*Pendukuhan"* yang berarti pasraman tempat tinggal Jro Dukuh Sakti Keturunan ke tujuh Pandita (Leluhur Pasek). Pura Agung Asem Kembar yang berada di lingkungan hutan (*Alas*) desa Tegallinggah, Sukasada dipercaya merupakan Pura *"Transit Niskala*" menuju ke Pura Segara Rupek, Candi Bakung, Pura Lempuyang Madya, dan Petilasan Jawa khususnya di Karanganyar/Solo. Jro Mangku Gede Sukerata menyatakan bahwa jumlah *Pemedek* yang bersembahyang kesana pada Piodalan Agung terakhir pada tahun 2019 akhir mencapai lebih dari 1000 *Pemedek* yang berasal dari seluruh umat Hindu di Bali. Dari hasil wawancara terhadap Jro Mangku Gede Sukerata sebagai Pengurus Pura Agung Asem Kembar menyatakan bahwa :

> Piodalan pada tahun 2019 kemarin sebelum Pandemi, kami kedatangan 100 orang *pemedek* yang berasal dari salah satu perguruan Hindu yang berada di Karanganyar Solo dengan tujuan *tangkil* dan menemui Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidakerthi

Pura Agung Asem Kembar merupakan pura *Dang Kahyangan Jagat* dengan keunikan selain dari sisi makna adanya pura tersebut juga terdapat keunikan dari sisi pengelolanya. Pura ini tidak dikelola oleh pemerintah daerah atau desa adat tempat pura tersebut berdiri seperti pada Pura Dang *Kahyangan* pada umumnya, tetapi pura ini dikelola oleh sebagian "*Krama Dadia Dharma Sentana*" yang artinya sebagian keluarga Dharma Sentana saja. Dari hasil wawancara awal terhadap bendahara kegiata Pura Agung Asem Kembar *Krama* yang menjadi pengelola pura Agung Asem Kembar sejumlah 70 Kepala Keluarga (KK). Disisi lain untuk piodalan terakhir sebelum Pandemi *Covid-19* menghabiskan biaya sebesar Rp 75.000.000,-. Dengan jumlah *krama* pengelola pura yang tergolong sedikit, apabila dihubungkan dengan pembiayaan upacara Piodalan Pura agung Asem kembar yang

mencapai Rp 75.000.000 untuk sekali acara sangat sulit bagi *krama Pengempon* untuk menopang pembiayaan tersebut tanpa memberatkan *krama.*

Akan tetapi pada kenyataanya pengelolaan pura Agung Asem Kembar untuk keperluan operasional seperti mengadakan upacara piodalan yang rutin setiap enam bulan sekali, acara *mesangih* massal yang kerap diadakan disana dapat terlaksana tanpa memberatkan *krama pengempon* pura terutama dalam hal pendanaan. Pura Agung Asem Kembar tidak dikelola oleh pihak desa adat atau pemerintah daerah sehingga pihak pengelola pura juga tidak meminta sumbangan ke masyarakat terkait pendanaan upacara-upcara tersebut. Salah satu *krama pengempon* Pura Agung Asem Kembar Putu Arta Adnyana mengatakan bahwa,

> Kami selaku *krama pengempon* tidak pernah diberatkan dalam pendanaan, *peturunan* pun yang dipungut terakhur hanya Rp 50.000 per KK, uang Rp 50.000 untuk upacara piodalan sebesar itu tegolong sangat murah, karena biasanya piodalan-piodalan di pura-pura lain yang saya juga jadi *kramany*a kadang kena *peturunan* sampai Rp 1.000.000 per KK.

Sumber pembiayaan kegiatan *piodalan* Pura Agung Asem Kembar ini berasal dari *punia pemedek, pengempon* dan juga pendiri pura. Selain itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada serangkaian *piodalan* Pura Agung Asem Kembar seperti *mesangih* massal dengan tarif Rp 600.000 per orang dengan peserta yang tidak sedikit, kemudian *pewintenan* dengan tarif Rp 400.000 per orang dengan peserta 40 sampai 50 orang, serta kegiatan *mebayuh* yang dilaksanakan dengan tarif Rp 1.500.000 per orangnya menjadi salah satu sumber utama pembiayaan *piodalan* Pura Agung Asem Kembar. Selain itu dari aspek akuntansinya pengelolaan dana di Pura Agung Asem Kembar dinilai kurang akuntabel dan transparan, dari laporan keuangannya yang belum menyertakan bukti transaksi seperti Nota, Kwitansi terutama dalam pembelanjaan sehari-hari. Salah satu penunjang dari baik tidak nya laporan keuangan dilihat dari bukti transaksi yang ada terutama untuk memudahkan

penyesuaian ketika ada kesalahan-kesalahan dalam pencatatan. Transparansi yang diterapkan di Pura Agung Asem Kembar juga dinilai kurang transparan karena menurut hasil observasi awal yang di sajikan dalam media seperti spanduk, dan papan pada saat *piodalan* hanya mencantumkan sumber-sumber pembiayaan dari kegiatan *piodalan* tersebut saja tanpa mencantumkan bagaimana pertanggungjawabannya. Selain masyarakat, *krama pengempon* pura juga tidak mendapat informasi terkait laporan pertanggungjawaban pengurus, *krama pengempon* pura hanya mendapat lembaran informasi mengenai sumber-sumber dana yang masuk dan sebagai pembiayaan *piodalan* Pura Agung Asem Kembar serta informasi mengenai jumlah iuran yang dikenakan kepada masing-masing *krama*.

Akan tetapi hal ini bukan menjadi masalah besar bagi *pengempon* ataupun pengurus Pura Agung Asem Kembar karena terdapat prinsip kepercayaan terhadap pengurus mengingat pengurus Pura Agung Asem Kembar berasal masih dalam satu keluarga sehingga kepercayaan untuk tidak adanya sikap korupsi atau hal lain yang merugikan orang lain masih besar. Menurut hasil wawancara awal peneliti terhadap pengurus Pura Agung Asem Kembar Jro Mangku Gede Sukerata, beliau mengatakan bahwa tidak adanya keberanian untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain di Pura Agung Asem Kembar karena hukum *Karma Phala* atau buah hasil dari perbuatan masih sangat dipercaya adanya. Dari adanya kajian yang spesifik dari sisi sosial dan akuntansi, maka penting untuk dilakukan sebuah penelitian yang berfokus pada pengelolaan dana Pura Agung Asem Kembar mulai dari sumber dana hingga pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pengelola kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Sesuai dengan pengertian teori

stakeholder bahwa suatu organisasi tidak hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap *stakeholder* nya dengan tetap dapat mengelola pura tanpa diberatkan dalam hal pendanaan.

Selain acara yang diadakan pengelola pura yang tergolong besar, proses pembangunan di areal Pura Agung Asem Kembar dapat terus berjalan secara berkesinambungan, terlihat dari observasi langsung peneliti terdapat bangunan baru yang belum rampung dengan tampilan cukup megah dengan nama "*Penataran Agung*" yang diperkirakan memerlukan biaya tidak sedikit. Menurut hasil wawancara awal terhadap pihak pengurus Pura Agung Asem kembar Jro Mangku Gede Sukerata sebagai Bendahara kegiatan menyatakan bahwa pembangunan di pura Agung Asem Kembar ini terus-menerus dilakukan seara berkesinambungan, beberapa diantaranya seperti Pembangunan pura "*Danginan*", pembelian lahan parkir, hingga pembangunan *"Penataran Agung*" yang belum rampung. Sumber dana dari pembangunan ini dikatakan berasal dari *punia* atau sumbangan dari Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti. Dengan adanya fenomena tersebut maka perlu diadakan penelitian terkait pengelolaan dana Pura Agung Asem Kembar. Besarnya pembiayaan kegiatan pura menjadikan praktik pengelolaan dana pada Pura Agung Asem Kembar salah satu poin yang menarik untuk dikaji lebih dalam karena hal tersebut sangat penting bagi suatu organisasi publik untuk dapat bertahan dan memaksimalkan perannya, terlebih lagi pengelolaan pura yang berkaitan dengan sosial budaya.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait pengelolaan dana dari suatu organisasi keagamaan. Penelitian yang dilakukan Nhingswari, dkk (2019) memperoleh hasil

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Desa *Pakraman* Bebetin dilakukan secara global untuk semua sumber pendapatan desa *pakraman* termasuk didalamnya pendapatan yang diperoleh dari hasil kontrak Tanah Druwe Pura. Terdapat 5 tahapan dalam pengelolaan tersebut. Pertanggungjawaban mengenai pelaporan keuangan Tanah Druwe Pura dalam hal ini tergabung dalam pelaporan keuangan desa *pakraman*. Perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Tanah Druwe Pura ini dengan diterapkannya 4 dimensi akuntabilitas. Sedangkan perwujudan transparansi laporan pertanggungjawaban yang dibuat serta kemudahan akses informasi bagi seluruh *krama* untuk memperoleh informasi mengenai pertanggungjawaban tersebut.

Agustana, dkk (2017) dalam penelitiannya memperoleh hasil yaitu (1) Secara garis besar, sumber dan atau pendapatan Pura *Kahyangan tiga* desa *Pakraman* Bondalem bersumber dari Dana *punia, sesari*, SHU LPD dan bantuan dari pemerintah. (2) Dalam pengelolan keuangan yang dilakukan oleh pengurus organisasi di Pura *Kahyangan Tiga* desa *Pakraman* Bondalem, dimana setiap ada kegiatan upacara atau pembangunan di Pura terlebih dahulu dibuatkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang menjadi acuan. (3) Yang dilakukan oleh pengurus oraganisasi yaitu berupa laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari rincian pengeluaran yang dilakukan pada saat kegiatan upacara atau pembangunan di pura. Laporan ini akan dibahas pada rapat sabha desa. (4) Dalam menunjang konsep akuntabilitas dan transparansi di pura *Kahyangan tiga* desa *pakraman* bondalem, Pengurus organisasi mengumumkan pemasukan dan pengeluaran desa pada saat rapat atau sangkepan dengan karma desa (*sabha* desa) selanjutnya akan diumumkan kembali pada saat piodalan maupun pada saat adanya pembanguanan di pura

khyangan tiga desa *pakraman* bondalem dan masing masing kelian banjar akan di berikan *hard copy* laporan pertanggungjawaban untuk di umumkan kembali di masing-masing banjar.

Asih, dkk (2017) dalam penelitiannya memperoleh hasil yaitu Desa *Pakraman* Julah yang pengelolaan keuangannya dilakukan oleh prajuru adat dalam hal ini yaitu bendahara desa adat dan kontrol yang dilakukan oleh prajuru adat yang lain seperti Kelihan Desa Adat, Wakil Desa Adat, Sekretaris dan kontrol tidak langsung dari *krama* adat mampu menerapkan 4 dimensi akuntabilitas publik. Empat dimensi tersebut yaitu Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*), Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*), Akuntabilitas Program (*Program Accountability*), dan Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability).*

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan pada organisasi *pengempon* Pura Agung Asem Kembar dengan berfokus pada pengelolaan dananya. Keunikan dari Pura Agung Asem Kembar terletak pada statusnya sebagai Pura *Dang Kahyangan Jagat* dengan *pengempon* yang berbeda dari Pura *Dang Kahyangan Jagat* lainnya yaitu satu garis keturunan keluarga *Dadia Dharma Sentana.*. Alasan pemilihan pura Agung Asem Kembar sebagai tempat penelitian karena pura ini merupakan Pura *Dang Kahyangan Jagat* yang baru berdiri sehingga belum dikenal orang banyak, dengan *Pengempon* sekitar 70 Kepala Keluarga tetapi mampu mengadakan acara yang besar tanpa memberatkan pihak *pengempon* dari sisi pendanaan sehingga sumber dana dari Pura Agung Asem Kembar ini menjadi hal yang menarik untuk di kaji serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan dana Pura Agung

Asem Kembar tidak berpengaruh pada kepercayaan *stakeholder* untuk tetap ikut serta dalam kegiatan Pura Agung Asem Kembar. Selain itu peneliti juga termasuk dalam salah satu anggota *Pengempon* Pura Agung Asem Kembar sehingga lebih mudah untuk mendapatkan data yang di inginkan terlebih lagi belum adanya penelitian terkait dengan Pura Agung Asem Kembar ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Analisis Pengelolaan Dana Pura *Dang Kahyangan Jagat* (Studi Kasus Pura Agung Asem Kembar, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu Pura Agung Asem Kembar dalam pembiayaan operasionalnya tidak memberatkan *krama pengempon* yang berjumlah 70 Kepala Keluarga dengan biaya yang relatif besar. Sumber dana dalam operasional Pura Agung Asem Kembar berasal dari pihak Internal dan eksternal. Mengingat sumber dana tersebut berasal dari sumbangan masyarakat dan *pengempon* pura, maka pengelolaan dana yang baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk menghindari perpecahan antar *Krama Pengempon* dan menghindari persepsi negatif dari masyarakat atau pihak eksternal pura yang memberikan sumbangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, peneliti memfokuskan untuk meneliti permasalahan terkait pengelolaan dana Pura Agung Asem Kembar sebagai Pura *Dang Kahyangan Jagat* yang dikelola oleh *Krama* Dadia Dharma Sentana.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti menentukan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pengelolaan dana Pura Agung Asem Kembar dari perencanaan yang meliputi sumber dana dan pembuatan Rancangan Anggaran Biaya, pelaksanaan yang meliputi proses akuntansinya, hingga pertanggungjawaban yang meliputi akuntabilitas dan transparansinya sebagai Pura *Dang Kahyangan Jagat* yang dikelola oleh *Krama* Dadia Dharma Sentana.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui praktik pengelolaan meliputi sumber dana dan pembuatan Rancangan Anggaran Biaya, pelaksanaan yang meliputi proses akuntansinya, hingga pertanggungjawaban yang meliputi akuntabilitas dan transparansinya sebagai Pura *Dang Kahyangan Jagat* yang dikelola oleh *Krama* Dadia Dharma Sentana.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik terhadap

penulis maupun pihak bekepentingan lainnya. Adapun maanfaat dari penelitian ini yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bukti empiris penerapan teori *stakeholder* dan konsep *good governance* khususnya pada organisasi nonformal di masyarakat. Selain itu diharapkan pula dari hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi pustaka.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi serta dapat dijadikan sebagai referensi dan dokumentansi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi *Krama Pengempon* dan Pengurus Pura Agung Asem Kembar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk kemajuan Pura Agung Asem Kembar dalam mengelola dana operasional pura dengan tetap menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku.

c. Bagi Peneliti

Sebagai wadah untuk mengembangkan dan menambah wawasan tentang sumber dana organisasi keagamaan dan pengelolaannya pada Pura Agung Asem Kembar.

d. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan untuk melengkapi penyediaan tambahan bahan, serta dapat dijadikan referensi bagi rekan-rekan dan pihak lain yang melakukan penelitian dengan tema permasalahan yang sama.